

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sehat merupakan suatu keadaan yang didambakan oleh setiap orang. Hingga batas-batas tertentu, tiap orang kecuali anak-anak, mampu menjaga kesehatannya sendiri. Mereka akan hidup dengan teratur, mengkonsumsi makanan bergizi, berolah raga secukupnya, dan sebagainya. Persoalan akan menjadi lain ketika orang jatuh sakit yang memerlukan pertolongan pihak lain. Bagaimanapun, kesehatan merupakan kebutuhan pokok dalam kehidupan, sedangkan pengetahuan dan keterampilan pasien terbatas. Dengan demikian, pasien maupun keluarganya akan mencari pertolongan kepada petugas kesehatan.

Pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, keamanan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Kesehatan merupakan bagian yang amat penting bagi manusia guna dapat melangsungkan kehidupannya. Untuk memenuhi kebutuhan kesehatan tersebut, banyak hal yang perlu dilakukan, termasuk yang terpenting adalah pelayanan kesehatan.

Saat ini, masyarakat semakin menyadari hak-haknya sebagai konsumen kesehatan. Sehingga seringkali mereka secara kritis mempertanyakan tentang penyakit, pemeriksaan, pengobatan, serta tindakan yang akan diambil berkenaan

dengan penyakitnya, bahkan tidak jarang mereka mencari pendapat kedua (*second opinion*), Hal tersebut merupakan hak yang selayaknya dihormati oleh pemberi pelayanan kesehatan. Memang harus diakui bahwa hak-hak konsumen kesehatan masih cenderung sering dikalahkan oleh kekuasaan pemberi pelayanan kesehatan. Dalam hal ini, yang memprihatinkan, kekalahan tersebut bisa berupa kerugian moral dan material yang cukup besar.

Maraknya pemberitaan tentang dugaan kelalaian pelayanan medis beberapa tahun terakhir ini menarik untuk disimak, seperti yang banyak terjadi di berbagai tempat di Indonesia. Perkembangan ke arah modernisasi cenderung mengutamakan kepentingan pribadi yang diwarnai dengan konsumerisme. Konsumerisme yang meluas ke arah komersialisme dimana memicu terjadinya penyalahgunaan profesi (*professional abuse*) yang makin jauh dari sifat altruistik dalam pelayanan kesehatan. Altruistik yang berarti mementingkan sikap untuk mensejahterakan orang lain makin sulit ditemukan pada masa sekarang. Sehingga, dengan terjadinya fenomena ini mengurangi rasa kepercayaan masyarakat terhadap para pelayan kesehatan., seiring dengan maraknya ibu-ibu di berbagai daerah yang menolak mengikuti program imunisasi bagi balita mereka yang diselenggarakan oleh pihak pelayanan kesehatan.

Penolakan ini mereka lakukan mengingat pernah terjadinya bayi menjadi cacat akibat program imunisasi yang diselenggarakan oleh pihak pelayanan kesehatan, dan masih banyak kasus yang kita jumpai di berbagai media tentang buruknya serta kecerobohan pelayanan kesehatan di negeri ini, ditambah lagi mahalny biaya perawatan serta jasa dokter membuat masyarakat mengurungkan

niatnya untuk berobat ke rumah sakit. Alhasil, penyakit yang di diamkan pun dapat membunuh sipenderita penyakit secara perlahan. Padahal, kesehatan sama halnya dengan kesejahteraan atau kesempatan memperoleh kehidupan yang layak, dalam artian merupakan hak setiap individu.

Hal ini seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah dalam hal memperbaiki citra pelayanan kesehatan dinegeri ini, dengan memberi pelayanan yang terbaik kepada masyarakat agar terwujudnya masyarakat yang sehat sentosa dan terwujudnya generasi yang baik.

B. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan hal-hal dalam latar belakang, maka di rumuskan masalah sebagai berikut :

Bagaimanakah penegakan hukum atas pelanggaran hukum dan etik dalam pelayanan kesehatan ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana penegakan hukum atas pelanggaran hukum dan etik dalam pelayanan kesehatan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini bermanfaat bagi :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum yang terkait dengan masalah pelayanan kesehatan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap masyarakat pada umumnya dan tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan mengenai penegakan hukum atas pelanggaran hukum dan etik dalam pelayanan kesehatan.

E. Keaslian penelitian

Penelitian ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikat ataupun plagiasi dari hasil penelitian orang lain. Penelitian ini memfokuskan pada penegakan hukum atas pelanggaran hukum dan etik dalam pelayanan kesehatan. Apabila di kemudian hari ada penulis yang menulis kajian yang sama, maka penulisan hukum ini bersifat melengkapi.

F. Batasan Konsep

Batasan konsep dari penulisan hukum mengenai “ Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Hukum dan Etik Dalam Pelayanan Kesehatan “ meliputi :

1. Penegakan hukum adalah Proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma – hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam

lalulintas atau hubungan – hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹

2. Pelanggaran hukum adalah suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan aturan-aturan hukum yang berlaku. Pada umumnya terhadap perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi.
3. Etik adalah nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu masyarakat.²
4. Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya baik yang diselenggarakan sendiri atau bersama – sama dalam suatu organisasi untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan, mencegah penyakit, mengobati penyakit, dan memulihkan kesehatan yang ditujukan terhadap perseorangan, kelompok atau masyarakat.³

G. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yang merupakan penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan data sekunder sebagai data utama yaitu peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

¹ www. Solusihukum. Com, Penegakan Hukum, data diambil pada hari jumat, tanggal 23/02/07, pukul 13.05 WIB.

² Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi terbaru, PT Gitamedia Press, Tim Prima Pene, hlm. 25

³ Dr. Veronica Komalawati, S. H., M. H. 1999, *Peranan Informed consent dalam Transaksi Terapeutik (Persetujuan Dalam Hubungan Dokter Dan Pasien) Suatu Tinjauan Yuridis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 77

b. Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder atau bahan hukum yang dipakai sebagai data utama, yaitu data – data yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

c. Metode Pengumpulan Data

1. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder, yaitu dengan cara membaca dan mempelajari literatur – literatur, perundang – undangan serta buku – buku yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

2. Wawancara dengan narasumber

d. Narasumber

Anggota komite medis rumah sakit Panti Rapih yang bernama dr. Hawa mustika, SU.

e. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan oleh peneliti dalam mengolah dan melakukan analisis data- data yang diperoleh dalam penelitian adalah dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan cara memahami data dan atau merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis, sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah atau kondisi yang diteliti, kemudian mengambil kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu suatu pola

berfikir dari suatu hal yang minim untuk dapat ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus dengan menggunakan penalaran (berfikir secara rasional).

H. Sistematika Penelitian

Usulan penelitian hukum “Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Hukum Dan Etik Dalam pelayanan Kesehatan”, menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum. Metode penelitian terdiri dari jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data.

BAB II. PELANGGARAN HUKUM DAN ETIK DALAM PELAYANAN KESEHATAN

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai tinjauan umum tentang pelayanan kesehatan, hukum dan etik dalam pelayanan kesehatan, tinjauan umum tentang hukum dan etik dalam pelayanan kesehatan, penegakan hukum dari aspek hukum pidana dan aspek etik dalam pelayanan kesehatan.

BAB III. PENUTUP

Bab ini merupakan penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran.